

## MEMBANGUN KEIKUTSERTAAN PEMUDA DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA

Moh. Arpat Rasyid<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sawerigading Makassar  
arpatsyd67@gmail.com

### Abstrak

Seiring berkembangnya jaman, di kalangan generasi muda, telah berkembang sebuah jargon yang menjadi ciri para pemuda dalam mengekspresikan kreatifitas dan aktivitas para pemuda yang khas kaum muda biasanya dikenal dengan istilah "gue banget" atau "berani tampil beda". Bagi pemuda Indonesia, istilah gue banget biasanya terwadahi dalam aksi-aksi revolusioner kebangsaan, tetapi dewasa ini ekspresi tersebut terkesan tergerus oleh banyak faktor seperti kepentingan ekonomi, dan politik, tanpa dipahami oleh generasi elit bangsa. Hal ini kemudian menyebabkan berbagai dampak terjadinya kesenjangan penafsiran komunikasi karena kesalahan pemahaman peran pemuda dalam paham-paham keindonesiaan dan pertahanan negara serta sempitnya ruang ekspresi kebangsaan pemuda yang telah menggerogoti potensi yang dimiliki oleh para penerus bangsa.

**Keywords:** Pertahanan Negara, Ekpresi Kebangsaan, Generasi Muda

### I. PENDAHULUAN

Era globalisasi ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, perkembangan inilah yang kemudian turut serta mempengaruhi pola dan bentuk ancaman terhadap ketahanan sebuah bangsa. Ancaman terhadap kedaulatan negara bergeser dari bentuk ancaman yang konvensional, menuju ancaman yang sifatnya multidimensional. Ancaman tersebut dapat datang dari berbagai macam rupa baik itu dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun kepada permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan transnasional, seperti terorisme, imigran ilegal, ancaman narkoba, pencurian kekayaan alam, dan kerusakan terhadap lingkungan sumber daya alam. Hal ini yang kemudian menjadi penyebab munculnya permasalahan pertahanan menjadi salah satu permasalahan yang cukup kompleks sehingga dalam proses penyelesaiannya tidak hanya bertumpu

kepada instansi yang menangani permasalahan pertahanan semata, melainkan sudah menjadi tanggung jawab seluruh instansi serta elemen terkait baik itu dari pihak pemerintahan maupun Lembaga non pemerintah.

Founding Fathers bangsa kita telah memikirkan perihal situasi tersebut dengan menetapkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata). Kompleksitas tantangan yang ada sudah menyangkut eksistensi negara dan bangsa maka akan menjadi tanggung jawab seluruh warga negara dalam segenap profesinya dalam rangka kepentingan membela bangsa dan negara. Hal itu juga telah dirumuskan dalam pengaturan hak dan kewajiban bela negara pada pasal 30 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, yang kemudian di amandemen dan dipindahkan ke ayat (3) pasal 27 Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk. Sistem pertahanan dan



keamanan rakyat semesta adalah resultante seluruh upaya bela negara dalam pertahanan negara. Dengan struktur pasal konstitusi yang telah disusun sedemikian rupa, Undang-Undang nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara menjabarkannya kedalam sebuah sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, kemudian dipersiapkan ke-dalam perspektif untuk menghadapi ancaman militer dan non militer, hal ini kemudian memberikan keluasaan akses dan peran para kaum muda.

## **II. PEMBAHASAN**

### **a. Lingkungan Strategis**

Dalam era globalisasi diwarnai oleh tiga ancaman strategis yang nyata, meliputi energy security, pemanasan global, dan tindak kejahatan terorisme. Energy Security menyangkut kelangkaan energi yang efeknya dapat mereduksi wajah dinamika antar bangsa menjadi homo homini lupus yang bermakna bahwa manusia menjadi serigala bagi sesama manusia. Kekhawatiran terhadap kelangkaan energi telah menyebabkan persaingan yang tidak sehat dalam memperoleh sumber-sumber energi global. Hal ini kemudian mendorong pihak-pihak kuat, atau negara yang memiliki kuasa lebih untuk menerapkan standar ganda dalam menerapkan politik luar negerinya, guna memperoleh sumber energi.

Perilaku standar ganda dalam rangka memenuhi hajat kerakusan ekonomi mengakibatkan adanya ketidakadilan global dan mampu merusak tatanan kehidupan internasional, hal ini kemudian dapat

mengantarkan manusia pada bahaya global warming. Di bawah panji-panji kapitalisme teknologi global, telah lumrah terjadi eksploitasi alam berdampak tidak hanya kepada hal-hal yang sifatnya natural seperti global warming, bahkan dikhawatirkan akan berdampak juga kepada hal-hal perubahan perilaku dan nilai-nilai sosial pada masyarakat luas. Perubahan sosial tersebut dapat terjadi akibat dari ketidakmampuan masyarakat untuk menghadapi tantangan perubahan yang sangat cepat, sehingga timbulnya rasa frustrasi di tengah masyarakat. Frustrasi yang tidak terperikan mengakibatkan tumbuhnya perilaku terror dan nihilism, yang akan mengakibatkan zero sum game. Sedikit contoh seperti peristiwa 9/11 pada Gedung WTC di Amerika Serikat, hal itu merupakan sebuah contoh ekstrim tapi nyata terjadi dan telah menyuburkan dan menebarkan perilaku teror di kalangan global.

Dalam bayang-bayang triple threat yang mencakup energy security, global warming, dan terrorism, era global yang saat ini mendorong persaingan antar bangsa semakin menyeruak. Ketajaman yang terjadi ini kemudian menyebabkan terbelahnya semangat kekeluargaan dan gotong royong regional. Semangat ASEAN tanpa disadari telah goyah disituasi seperti itu. Sehingga tanpa tedeng aling-aling sipadan dan ligitan pun diperebutkan, juga hal serupa terjadi di ambalat, dan insiden kecil kekuatan militer di perbatasan laut maupun darat secara sporadic telah terjadi. Belum lagi perihal permasalahan tenaga kerja Indonesia yang berdimensi ganda. Pada satu sisi



permasalahan itu menunjukkan riak ketidaknyamanan hubungan inter regional Asia Tenggara, pada sisi lain menunjukkan lemahnya daya serap tenaga kerja, dengan kata lain telah terjadi penyempitan peluang tenaga kerja secara nasional. Tingginya pengangguran menjadi salah satu permasalahan sosial yang berskala nasional, hal ini dikarenakan berdampak aspek keamanan yang dapat berimplikasi kepada aspek politis.

Hal tersebut juga dapat diperparah dengan lahirnya berbagai macam Tindakan anarki, serta lemahnya kesigapan dalam penanganan bencana, ketimpangan dan kesenjangan sosial, merupakan sebuah potensi sekaligus sebagai indikasi lemahnya pertahanan dan stabilitas nasional. Kondisi seperti ini merupakan gambaran jelas bagaimana diremehkannya seluruh keberhasilan Indonesia dalam proses diplomasi global warming, menjadi ketua Sidang Dewan Keamanan, serta keberhasilan sektor ekonomi makro yang mampu bertahan ditengah hantaman bencana ekonomi global.

Dengan gambaran lingkungan strategis yang sedemikian rupanya, maka ancaman non militer pada hakikatnya menggunakan beberapa faktor yang berdimensi politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbud), dan teknologi serta informasi, yang dinilai mempunyai kemampuan dalam membahayakan kedaulatan sebuah negara, keutuhan wilayahnya, serta keselamatan segenap bangsa. Lemahnya nilai-nilai dasar serta norma hidup adalah dasar dari lemahnya nilai dan norma budaya bangsa. Jika hal tersebut terjadi dan tetap tumbuh subur

hingga bersenyawa dengan kepentingan negara lain maka sudah berkaitan dengan kondisi strategis geopolitik maupun geoekonomi yang dikandungnya, seperti apa yang terjadi pada Afganistan, Irak, dan tidak menutup kemungkinan Korea Utara dan Iran, kemudian yang paling strategis namun krusial yakni Indonesia.

Pelajaran itu menunjukkan bahwa proses diplomasi atau ancaman militer pun masih sangat mungkin terjadi di era global yang dikatakan semakin berdad. Perang memang merupakan sebuah diplomasi dalam bentuk lain. Ancaman militer adalah ancaman yang mengandalkan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang mempunyai kemampuan dalam membahayakan kedaulatan sebuah negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Adapun ancaman militer menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara antara lain berbentuk seperti, agresi pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan bersenjata, dan perang saudara.

#### **b. Sistem Pertahanan Negara**

Sistem pertahanan negara dalam rangka menanggulangi ancaman militer selalu menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan pendukung. Komponen cadangan terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dapat dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar



dan memperkuat komponen utama. Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Dalam kerangka ancaman militer ini, untuk kepentingan pertahanan sumber daya alam negara, sumber daya buatanya, serta sarana dan prasarana nasional yang berada di dalam dan/atau di luar pengelolaan Kementerian/Lembaga terkait yang membidangi pertahanan untuk dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, baik itu sebagai komponen cadangan maupun komponen pendukung.

Dalam proses persiapan menghadapi ancaman militer, pada awalnya sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional, berada di luar daripada fungsi pertahanan, tetapi hal tersebut bertujuan untuk kepentingan pertahanan seluruh sumber daya nasional agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Dalam melakukan pemanfaatan sumber daya dan sarana serta prasarana nasional yang posisinya tersebar di berbagai fungsi pemerintahan dan bahkan berada di dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer dengan menempatkan Lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi, dan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Susunan kekuatan dalam menghadapi ancaman non militer ini tidak

dalam susunan komponen, tetapi berada dan menjadi unsur dalam pelaksanaan fungsi dan dinamika kehidupan bangsa. Sementara bentuk bangun kekuatannya bukanlah berasal dari hasil persiapan fisik dan keahlian dalam suatu spesifikasi bidang, mengingat keberagaman ancaman yang mungkin timbul. Bentuk bangun kekuatan dalam menghadapi ancaman non militer masih berada dalam kode etik dan sikap integritas serta jati diri bangsa dalam profesionalisme itu. Oleh sebab itu Pendidikan kewarganegaraan adalah landasan dan bingkai dari seluruh bentuk bangun kekuatan dalam sishanta, yang tersaji secara grafis sebagai berikut:



Seiring dengan pembinaan aspek intelektualitas dalam profesionalisme, dianggap perlu untuk dilakukan penguatan aspek mental dalam rangka pembentukan kekuatan non militer. Dalam kerangka sistem pertahanan negara bentuk bangun itu diupayakan

perwujudannya melalui kesadaran bela negara. Upaya pembentukannya diselenggarakan melalui Pendidikan kewarganegaraan. Di dalam Pendidikan kewarganegaraan itu sendiri sudah mencakup pemahaman tentang kesadaran bela negara. Dengan demikian Pendidikan kewarganegaraan sebagai bentuk upaya persiapan secara dini penyelenggaraan pertahanan negara oleh pemerintah akan melahirkan hasil bangun kekuatan yang berdimensi ganda. Dimensi pertama adalah masif dalam profesionalisme untuk menghadapi ancaman non militer, sedangkan dimensi kedua adalah kesadarannya bahwa untuk kepentingan pertahanan negara sumber daya nasional dalam lingkup pengelolaan profesionalismenya siap mendukung komponen pertahanan negara menghadapi ancaman militer.

### **c. Memfasilitasi Peran Pemuda**

Berbicara mengenai peran pemuda dalam proses kebangsaan Indonesia secara faktual dijumpai bahwa penggerak heroisme yang mengubah jalannya sejarah Indonesia adalah pemuda. Diketahui bahwa hampir seluruh torehan sejarah di Indonesia diperani oleh pemuda itu sendiri, seperti Gerakan 1908, 1928, 1945, 1966, hingga kepada reformasi pada tahun 1998. Demikian juga dengan sejarah perang kemerdekaan yang terjadi dalam peristiwa palangan Ambarawa, Bandung lutan api, Medan Area, pertempuran 10 Nopember Surabaya, Pertempuran 5 hari di Semarang, serta serangan umum 11 Maret. Beberapa kejadian tersebut terdapat andil besar pemuda pada saat

itu. Dalam persepektif pertahanan negara, peran sejarah pemuda itu pada dasarnya dapat dipandang sebagai peran nyata pemuda dalam menghadapi adanya ancaman militer dan non militer, yang dikristalisasikan dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan demikian pada dasarnya peran pemuda pada masa lalu adalah peran strategisnya dalam kristalisasi sistem pertahanan negara. Pertanyaannya dengan sistem pertahanan negara di era global dewasa ini di manakah peran pemuda tersebut? Hal ini yang menjadi tanda tanya kita saat ini terkait keikutsertaan pemuda dalam usaha mewujudkan sistem pertahanan negara yang solid.

Dalam dinamika hidup bangsa yang semakin demokratis, peran pemuda Indonesia posisinya saat ini berada pada sumbangsuhnya untuk mewujudkan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta beraspek non militer. Dalam hal ini peran pemuda sangat membanggakan, tetapi dari segi konsepsi dan metode masih tidak jauh dari kebutuhan pengakuan eksistensi dan peran sejarahnya. Kelemahan pemuda dalam memahami konsepsi telah mengakibatkan dangkalnya daya kritis dan penyikapan yang keliru dalam memandang sebuah kondisi. Dalam kacamata pertahanan, fragmen tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari indikasi lemahnya kekuatan nonmiliter dalam dinamika komunikasi menghadapi dinamikanya sendiri. Saat ini dinilai terdapat kesenjangan persepsi dalam komunikasi antara generasi muda dengan elit bangsa, dari sisi pemuda reaksi cepat merupakan hal yang



mendasar untuk dapat menolak kebijakan pemerintah, sedangkan dalam pandangan elit bangsa hal tersebut merupakan kedangkalan kebangsaan. Pendeknya terdapat kesalahan penafsiran dalam komunikasi untuk menyikapi peran generasi muda dalam dinamika kehidupan bangsa antara pemuda dan elit bangsa.

Menjembatani kesenjangan tafsiran code dan encode komunikasi tersebut, perlu dikembangkan perspektif pertahanan dalam menyikapinya. Persepektif tersebut dibawa dalam bingkai pertahanan untuk dapat melihat kondisi kesenjangan komunikasi tersebut sebagai "dimensi kondisi yang terjadi" dan "dimensi kondisi komunikasi yang terjadi", yang pada dasarnya dapat berkembang menjadi ancaman non militer. Dimensi kondisi yang terjadi adalah ketidakselarasan komunikasi yang menjadi kelemahan dan scenario yang diharapkan oleh yang berkepentingan (dapat negara lain, dapat juga kepentingan golongan). Aspek pertahanan melihat ini sebagai sebagai ancaman non militer, dalam aspek lemahnya rasa, faham dan semangat kebangsaan, sehingga membuat lupa bahwa dinamika yang terjadi sebenarnya telah "menelanjangi" kelemahan sendiri.

Sedangkan dimensi kondisi komunikasi yang terjadi adalah sempitnya sudut pandang pemuda dalam memahami permasalahan bangsa yang diperkuat oleh arogansi elit bangsa dalam menangkap aspirasi pemuda maupun aspirasi sejarah peran pemuda dalam kehidupan bangsa. Pada sisi ini keduanya dalam kondisi "baru merasa bisa, tetapi belum bisa merasa". Artinya

masing-masing merasa menjaga teguhnya ke-indonesiaan, tetapi dalam versi dan perspektif masing-masing tanpa mau saling memahami. Untuk mengurai dua permasalahan dimensi komunikasi dibangun kesamaan persepsi dalam permasalahan kebangsaan dan membangun pemahaman serta bagaimana mengembangkan peran pemuda dalam sistem pertahanan negara. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan kerangka kebijakan mendasar serta berkadar yuridis tinggi yang menggugah rasa cinta tanah air dan rasa faham serta semangat kebangsaan dan bela negara. Kelembagaan penamaan rasa, faham dan semangat kebangsaan dan bela negara yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan dalam konsepsi peraturan perundang-undangan merupakan sebuah landasan resmi dalam membangun konsep dasar pertahanan negara oleh pemerintah yang akan dilakukan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut yang kemudian menjadi bagian dari sistem pertahanan itu sendiri dalam menghadapi ancaman non militer.



### **III. KESIMPULAN**

Tantangan dewasa ini sangat kompleks. Mengamati lingkungan strategis sudah tidak ada kondusifitas masa lalu, yang ada adalah persaingan bebas. Dalam persaingan bebas itu sikap gentleman, pro patria atau patriotisme menjadi sangat strategis, karena pergaulan antar bangsa yang demokratis. Didorong dengan adanya triple threat, kompleksitas itu cenderung menajam dan sangat berpengaruh meskipun itu terhadap solidaritas negara anggota ASEAN. Para pendiri bangsa ini telah memikirkan hal tersebut dengan merancang dan melahirkan sebuah sistem awal yang dikenal dengan sistem pertahanan dan kemanan rakyat semesta. Jabaran kearifan itu adalah pengaturan Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 yang di dalam Undang-Undang tersebut telah menetapkan dua subsistem pendukung sistem pertahanan negara bersifat semesta, yakni sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer dan non militer.

Dalam perspektif dua subsistem tersebut. Pertahanan negara memandang peran sejarah pemuda yang sangat kuat. Jika pada awal perjuangan kemerdekaan pada tahun 1908 sampai dengan pasca kemerdekaan 1998 pemuda berkedudukan sebagai wilayah kekuatan non militer yang dimiliki oleh negara, dalam berbagai

pandangan dan medan pertempuran maka andil pemuda berada dalam wilayah kekuatan militer pada saat itu. Menjawab tantangan akses dan peran pemuda dalam pandangan keindonesiaan dan sistem pertahanan dewasa ini harus terlebih dahulu terjembatani kesenjangan penafsiran komunikasi antar pemuda dan elit bangsa. Jembatan itu dirancang pemerintah melalui Pendidikan kewarganegaraan yang diharapkan dapat menjadi media yuridis dalam menyatukan visi, rasa, fahaman dan semangat kebangsaan yang dianggap selama periode pasca reformasi telah luntur.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Buku Putih Pertahanan, "Mepertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21", Dephan, 2003
- Gaebler, Ted, Orborne David, "Mewirusahaakan Birokrasi, Reinventing Government, Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik", Jakarta, PT Pustaka Binaman, 1995.
- Kennedy, Paul, "The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000", New York, Random House, 1987.
- National Intelligence Council, "Mapping the Global Future", Report of The National Intelligence Council, Honolulu, 2004.
- Smith, Dan, "The Penguin Atlas of War and Peace", New York, Penguin Book, 2003.

